



Tidak Tenang Kalau Pulang Larut Malam

Warga Kampung Bekas Lokalisasi Protes ke Pemkot Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Kampung Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta dikenal sebagai kawasan lokalisasi legal pada era 1973-an. Meski pemerintah resmi menutup kampung yang dikenal dengan sebutan Sanggrahan itu pada 1997, hingga kini citra buruknya tak kunjung hilang.

Pemerintah dianggap kurang serius memulihkan nama baik Kampung Mrican. Sudah sekitar 21 tahun berjalan sejak penutupan lokalisasi, masyarakat masih risih dengan anggapan publik yang hingga kini masih menflai sisi buruk Kampung Mrican.

● ke halaman 11

Pemerintah jangan cuma iya-ya saja. Janjinya mana? Walaupun ada orang baik di sana (Mrican), tapi yang kelihatan 'mbakmbaknya

Sefina
Warga Mrican

TRIBUN JOGJA/
PRADITO RIMA
PERTAMA
POS PANTAU
- Pos pantau pekerja seks komersial (PSK) yang didirikan warga di belakang gerbang sisi timur Terminal Giwangan Yogyakarta. Foto diambil pada Rabu (4/7).

Tidak Tenang Kalau Pulang

• Sambungan Hal 1

"Saya malu kalau ditanya teman-teman rumahnya mana. Giwangannya mana? Oh, Mrican yang banyak PSK (Pekerja Seks Komersial), banyak orang makbunya. Saya malu ngaku orang Mrican," ujar Sefina, warga Mrican saat ditemui di kompleks Balal Kota Yogyakarta, Rabu (4/7).

Kala itu ekspresi Sefina terlihat sangat emosional sekali, tak kuasa membendung tangisnya. Saat menyuarakan keluh kesalnya di hadapan pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta, suaranya melengking dan mengemana di seantero ruang Pandana.

Sefina datang bersama puluhan warga Mrican. Mereka mendatangi kompleks balal kota dengan tujuan menemui Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Warga meminta keseriusan pemerintah benar-benar turun ke lapangan dan dan bekerja sungguh-sungguh dalam menumbuhkan nama baik Kampung Mrican. Mereka ingin kampungnya tak lagi dipandang sebelah mata.

Penutupan lokalisasi di Mrican masih menyisakan permasalahan sosial. Persewaan citra buruk ini merupakan pekerjaan rumah yang mesti ada pemerintah turut bertanggung jawab. Upaya baik untuk menghapus citra buruk itu, semisal mendeklarasikan Kampung Mrican sebagai Kampung Takwa, ternyata citra buruknya masih melekat.

"Saya tidak tenang saat harus pulang larut malam dan meminta keluarga untuk sekedar menjemput. Pemerintah jangan cuma iya-ya saja. Jahjinya mana? Walaupun ada orang baik di sana (Mrican), tapi yang kelihatan mbak mbaknya," ujar Sefina.

Perlu diketahui, kegelisahan warga ini dipicu kasus percobaan pemerkosaan di Mrican oleh seseorang, dimana korbananya seorang anak berusia 11 tahun pada Senin (2/7) pagi sekitar pukul 08.00. Peristiwa ini dijadikan momentum untuk meneguh janji pemerintah untuk membersihkan Mrican dari citra buruk

bihi terjadi ketika cucunya masih terlelap tidur. Pelaku masuk melalui pintu belakang menuju kamar korban. Pelaku mencekik dan membungkam mulut korban agar tidak menimbulkan kegaduhan. "Saya sudah kerja dan istri saya hendak kerja ke terminal," ujarnya.

Korban berhasil menggigit tangan pelaku dan bisa melarikan diri, berteriak-teriak. Pelaku sempat kabur. Warga memburunya dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Pelaku berhasil ditangkap dan diamankan polisi. Tidak ada aksi main hakim warga. Setelah di kantor polisi dan melakukan dialog, sepakat berdamai dan peka berjanji tak mengulangi perbuatannya lagi.

Disinggung mengenai kondisi Kampung Mrican saat ini, Saroni menuturkan sudah tidak ada lagi warga yang berprofesi sebagai PSK. Hal tersebut dikarenakan warga langsung melakukan penggerebekan saat ada pasangan yang hendak melakukan tindakan prostitusi di Mrican dan diserahkan ke pihak kepolisian.

"Saat Idul Fitri kemarin tertangkap dua pasang. Semua orang luar Mrican.

Kalau yang 'nongkrong-nongkrong' di situ sudah tidak berani karena langsung ditangkap warga," tandasnya.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Sarjono, menjelaskan, dirinya yang akan turun tangan langsung untuk menangani kondisi di Mrican. "Saya mewakili Pak Wali Kota akan memproses itu. Kalau saya tidak jalan, tembak tegur. **Red!** saya," tandasnya.

Sarjono meminta camat mendata pemondokan yang ada di Kampung Mrican. Tak cukup sampai di sana, ia meminta Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidhiartana menangani hal tersebut. "Pak Nurwidhi saya minta mulai hari ini patroli dulu. Dilihat apa yang terjadi. Dengarkan suara masyarakat untuk dilakukan langkah konkret selanjutnya," bebernya.

Terkait citra Kampung Mrican yang dikeluhkan warga, Sarjono mengatakan, segera meminta Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta men-

tutupnya. Ditegaskan secara terpisah, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada warga Mrican yang menyampaikan aspirasinya. "Aspirasi itu merupakan dukungan warga kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera mengambil tindakan-tindakan konkret terkait pelanggaran-pelanggaran ketertiban, khususnya di wilayah Mrican," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta segera menindaklanjuti dengan optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan penertiban. Haryadi Suyuti meminta OPD terkait memberikan perhatian lebih kepada wilayah Mrican untuk mengubah stigma negatif kampung terkait isu 'remang-remang'.

"Pemerintah Kota Yogyakarta bersama warga Mrican harus bisa membuat Mrican sebagai kampung yang dibanggakan," katanya.

Deklarasi Kampung Taqwa beberapa hari lalu, menurut Wali Kota, harus didukung dengan langkah-langkah konkret baik secara fisik, sosial, dan mental spritual.

Sinergi Pemerintah dan Warga

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar, menanggapi, sebenarnya pemerintah kota, dalam hal ini Satpol PP, telah memiliki gerakan Panca Tertib untuk kampung-kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Satu di antara poinnya adalah tertib sosial.

"Jadi tertib sosial ini semacam ada peranan warga yang ikut turun untuk memberantas penyakit masyarakat, tentunya dengan support pemerintah," ujarnya.

Program Panca Tertib tidak bisa dilakukan hanya dari unsur pemerintah sendiri, maupun masyarakat sendiri. Keduanya harus bersinergi menegakkan ketertiban di lingkungan Kota Yogyakarta.

Polisi PKS tersebut menambahkan, masalah prostitusi tak hanya menyangkut tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, namun juga perlu koordinasi dengan kepolisian. "Perzinahan harus segera ditindaklanjuti pemerintah

Masih Ada Prostitusi Terselubung

SINAR matahari senja menerangi Kampung Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Rabu (4/7). Masyarakat setempat tampak sibuk beraktivitas di tengah tingginya mobilitas Terminal Giwangan.

Terlebih di sekitar pintu belakang terminal, tepatnya di sepanjang Jalan Kyai Guno Mrico, lalu jalang kendaraan bermotor silih berganti. Disinyalir masih ada praktik prostitusi di sana.

Yamtina (59), warga Mrican, Gi-

wangan, Umbulharjo, kerap di-datangi pria-pria hidung belang yang kesasar di rumahnya. Karena itu, setelah bakda isya, Yamtina memilih menutup rapat pintu rumahnya.

"Pemah ada orang datang dan tanya-tanya 'mana ceweknya? Kok sepi?', ya saya jawab 'cewek opo? Tidak ada seperti itu di sini'. Kalau dijawab gitu langsung pergi orangnya.

● ke halaman 11

Masih Ada Prostitusi

● Sambungan Hal 1

Kalau orang yang suka kesasar ke sini (rumah Yamtina, Red) itu laki-laki, kadang siang dan malam," katanya.

Yamtina bersama suaminya telah bertempat tinggal di Mrican sejak 1974. Yamtina juga mengetahui bahwa di sekitar kediamannya dulu pernah dipergunakan sebagai tempat lokalisasi legal.

Wanita berkerudung ini mengungkapkan, daerah bekas lokalisasi itu masih lekat hiruknya sekarang dan membuat rasis. Kerisihan itu diakibatkan kediamannya kerap didatangi pria hidung belang yang mencari layanan PSK.

Disinggung mengenai dugaan adanya bangunan dijadikan tempat prostitusi terselubung, ia membenarkan. Menurutnya, warga telah mengingatkannya berulang kali.

Diungkapkannya, praktik prostitusi tidak dilakukan secara terang-terangan. Namun, tetap saja apa yang dilakukan PSK itu telah mencemari nama kampung.

"Kalau (wanita) yang dipinggir-jalir jalan tidak ada, sekarang lebih banyak boncengan naik motor dari luar. Tidak tentu juga kapan datangnya orang-orang itu," katanya.

Yamtina berharap Pemkot menanggulangi dan mencari solusi terkait masih adanya tempat yang diduga menjadi

tempat praktik prostitusi secara terselubung. "Harapannya bisa bersih dari hal itu, agar kampung tidak tercemar dan badahnya juga khusyuk," pungkasnya.

Pos Pantau WTS/PSK

Untuk memperketat pengawasan praktik prostitusi terselubung, warga setempat mendirikan sebuah posko di dekat pintu gerbang belakang Terminal Giwangan. Saat mendekati posko bercat putih tersebut, reporter *Tribun Jogja* mendapati sebuah spanduk putih berkombinasi oranye terpampang di bagian depan posko, bertuliskan "Pos Pantau WTS/PSK".

Kala itu, ada masyarakat sekitar yang sedang bersantai. Semakin penasaran, reporter *Tribun Jogja* menyusuri jalan dimana sisi kanan kirinya banyak pedagang menjajakan dagangannya.

Selain itu, banyak pula tempat penitipan kendaraan bermotor.

Ingin mengetahui lebih jauh mengenai tempat tersebut, akhirnya reporter *Tribun Jogja* mendatangi rumah Ketua RW, 9, Sarono.

Pria berusia 59 tahun yang juga warga Mrican tersebut mengungkapkan bahwa "Pos Pantau WTS/PSK" dibuat karena berkaitan dengan persoalan prostitusi.

Diakuinya, sekitar empat puluh lima tahun lalu, tepatnya di atas sebidang tanah yang saat ini dipergunakan sebagai tempat uji kendaraan berkala (KIR) di sisi timur Terminal Gi-

wangan, pemah berdiri lokalisasi legal.

Menurutnya, tempat tersebut dahulunya bak sebuah kompleks yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari adonan semen. "Dulu memang ada tempat (prostitusi) legalnya dan pemerintah saat itu yang membuatnya. Seperti perumahan itu dulu di dalam bentengnya. Tapi ada batas waktunya dulu, yaitu sampai jam 12 malam," katanya.

Jumlah mucikari di lokalisasi legal tersebut amat banyak, lebih dari 50 mucikari. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada 1997, lokalisasi legal itu dibubarkan Pemkot Yogyakarta bersama masyarakat sekitar.

"Seingat saya, waktu itu saat mau bubarin ada orang yang lagi mabuk terus teriak-teriak tidak terima, ada yang bakar gubuk juga saat itu. Tapi akhirnya tidak anarkistis dan mereka bubar," ucapnya.

Pascapembubaran lokalisasi legal itu, orang-orang yang sebelumnya menempati tempat tersebut berpencar dan tidak pernah kembali lagi.

Meski demikian, diakuinya bahwa sebagian wanita PSK ada yang masih bertahan dan mendirikan warung-warung tak jauh dari kampungnya.

"Karena dirasa meresahkan masyarakat bersama Pemkot membubarkan yang di ring road itu. Bahkan agar tidak

ada lagi, kami sama pemerintah kerja sama mencarikan pekerjaan yang layak bagi mereka, dan kebanyakan mucikari

menyetujuinya," katanya. Diungkapkannya, dari sekian mucikari yang menyetujui, ada satu mucikari yang enggan menyetujuinya.

Sarono membenarkan kalau saat ini diduga masih ada yang menggelar praktik prostitusi. Masyarakat pernah mendapati beberapa pasangan mesum di sebuah bangunan.

"Kalau sekarang memang sudah tidak ada PSK. Sistemnya bawa pasangan dari luar. Kebanyakan pendatang. Setelah itu menyewa tempat jam'jam.

Pas malam Lebaran digrebek warga, ketangkap dua pasangan mesum," ucapnya.

Warga telah berupaya maksimal membersihkan praktik prostitusi di wilayahnya. Namun dia masih miris dengan keadaan saat ini.

"Dampaknya membuat masyarakat waswas. Anak perempuan remaja jadi takut keluar karena pernah kena imbasnya. Kami ingin Pemkot mengambil sikap menanggapi masalah ini," ujarnya.

Untuk mengawasi praktik prostitusi terselubung di wilayahnya, masyarakat telah membuat sebuah posko pemantau PSK. "Alasan Pemkot tidak ada posnya, setelah kami buat katanya akan ada dari Pemkot yang mengawasi, tapi sampai sekarang kok nggak ada. Padahal kan sudah dibuatkan (Posko), sekali lagi, dengan ini harapannya Pemkot

bengerak dan tidak hanya mengumbar janji-janji saja," ujarnya. (td)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Giwangan			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 06 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005